



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH TANAMAN  
PANGAN DAN HORTIKULTURA HAMPARAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang Ketahanan Pangan dan Pertanian dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA HAMPARAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya selanjutnya disebut UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya Kabupaten Balangan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya Kabupaten Balangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya merupakan UPTD Kelas A.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok

Pasal 4

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan membina produsen benih atau penangkaran serta pengendalian mutu.

Bagian Keempat  
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program penyediaan dan produksi benih tanaman pangan dan hortikultura yang bersertifikat/berlabel;
- b. pengembangan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pusat informasi teknologi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. tempat pelatihan pembenihan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya terdiri dari :
  - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya

Pasal 7

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengujian /observasi varietas baru dan pemurnian benih varietas unggul;
- b. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melaksanakan pelayanan penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura kepada penangkar benih;
- d. memperbanyak benih tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan penangkar benih;
- e. melakukan kegiatan percontohan tanaman pangan dan hortikultura;
- f. menyelenggarakan pelayanan penyebaran informasi perbenihan;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

Pasal 9

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan perlengkapan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan produksi benih, pengembangan teknologi serta informasi perbenihan serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya.

## Pasal 13

Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV TATA KERJA

## Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 15

Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 16

Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 17

Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

## Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

## Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 22

Pejabat dan Pegawai UPT yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat dan penempatan pegawai berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Hamparaya Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 23 Agustus 2021

PLH. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. YULIANSYAH

**Salinan sesuai dengan aslinya**

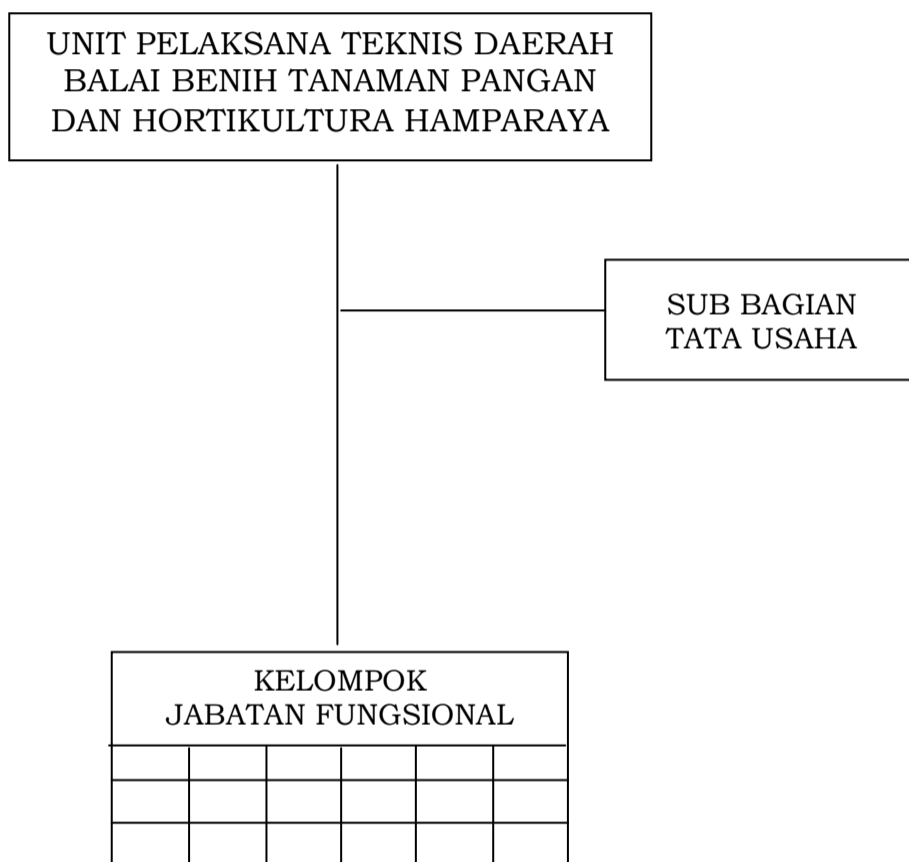
**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 57 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
HAMPARAYA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)  
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN  
DAN HORTIKULTURA HAMPARAYA  
KABUPATEN BALANGAN



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009